



Governance of the Expansion Area in Bintauna Village, Bintauna District, North Bolaang Mongondow Regency

Cisilia Korompot

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bina Taruna Gorontalo

Corresponding Author: Cisilia Korompot cisiliakorompot20@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Governance, Expansion Area, Bintauna Village

Received : 12, December

Revised : 15, January

Accepted: 17, February

©2023 Korompot: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to find out about the Governance of Expansion Areas in the Bintauna Village, Bintauna District, North Bolaang Mongondow Regency. This type of research is Qualitative. This type of research is descriptive. Data collection techniques use instruments in the form of observation, interviews, and literature studies. The results of this study indicate that communication between sub-districts, sub-districts and districts has been running but not optimal, so that the regulations for the Bintauna sub-district are not in accordance with procedures because the sub-district rules are still attached to sub-districts such as villages, which causes the implementation of services to not run optimally because there are still many things that need to be fixed, especially regarding the rules because in fact the ward has its own government but in its implementation it is still attached to the supervision of the sub-district. It is suggested that it is necessary to make improvements in all aspects such as communication, village regulations, and implementation of services so that the program can run optimally.

Tata Kelola Pemerintahan Wilayah Pemekaran di Kelurahan Bintauna, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Cisilia Korompot

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bina Taruna Gorontalo

Corresponding Author: Cisilia Korompot cisiliakorompot20@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Tata Kelola, Wilayah Pemekaran, Kelurahan Bintauna

Received : 12, December

Revised : 15, January

Accepted: 17, February

©2023 Korompot: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui Tata Kelola Pemerintahan Wilayah Pemekaran Di Kelurahan Bintauna, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif, Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi antara kelurahan, kecamatan dan kabupaten sudah berjalan namun belum optimal, sehingga peraturan kelurahan bintauna belum sesuai prosedur sebab aturan kelurahan masih melekat di kecamatan seperti desa, yang menyebabkan pelaksanaan pelayanan belum berjalan optimal sebab masih banyak yang harus di benahi terutama mengenai aturan karena sebenarnya kelurahan memiliki pemerintahan sendiri namun dalam pelaksanaannya masih melekat dibawa pengawasan kecamatan. Disaran perlu melakukan pembenahan di segala aspek seperti komunikasi, peraturan kelurahan, dan pelaksanaan pelayanan agar program dapat berjalan dengan optimal.

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah merupakan hak daerah untuk mengatur, mengelola dan mengembangkan potensi atau sumber daya yang ada di daerahnya sendiri. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari faktor tata kelola yang baik dan benar. Tata kelola yang baik dan benar itu adalah tata kelola yang mampu membuat makmur dan sejahtera masyarakat. Output dari pada tata kelola yang baik dan benar adalah sistem pemerintahan yang *good governance*.

Tata kelola pemerintahan yang baik dianggap sebagai prasyarat bagi dunia yang damai dan terbuka, hal itu juga dianggap sebagai elemen penting yang dapat merumuskan suatu strategi pembangunan. *Governance* juga akan dipelajari secara mendalam atas dasar berbagai alur isu, dalam konstitusi masing-masing negara dengan kehidupan politik, ekonomi dan sosial. Kualitas tata kelola sebagian diakui oleh efisiensi pemerintah dalam melaksanakan strategi yang baik. Peran pemerintah dapat memperluas pembentukan hak kepemilikan baik pada unit perlindungan polisi, peradilan dan pertahanan nasional. Tata kelola atau pemerintahan yang baik di sektor publik maupun swasta dianggap sebagai faktor keberhasilan utama.

Kelurahan Bintauna Kecamatan Bintauna tata kelola pemerintahan yang baik dihadapkan dengan berbagai kendala dan permasalahan khususnya dalam menjalankan roda pemerintahan yang disebabkan kurangnya koordinasi mengenai peraturan perundang-undangan di kelurahan, karena belum ada kepastian peraturan yang jelas di kantor kelurahan tersebut sehingga belum sesuai dengan standar operasional prosedur dalam menjalankan roda pemerintahannya. Kondisi seperti ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah, untuk itu perlu adanya koordinasi yang jelas mengenai pembuat aturan kerja atau yang sering kita sebut tata kelola pemerintahan dalam sistem pemerintahannya. Adanya koordinasi yang ada sudah tentu mempermudah kita dalam membuat aturan atau pun berjalannya sistem pemerintahan yang ada. Sudah tentu jika bicara tentang aturan-aturan dan program kerja pemerintah pasti berkaitan dengan otonomi daerah. Program kerja harus dibuat dengan sistematis, terpadu dan terarah, karena program kerja dalam organisasi menjadi pegangan anggota atau unit-unit di dalamnya untuk mewujudkan tujuan tertentu. Keberhasilan aturan kerja pemerintahan tidak terlepas dari faktor tata kelola yang baik dan benar. Output dari pada tata kelola yang baik dan benar adalah sistem pemerintahan yang *good governance*.

Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Kelurahan Bintauna, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam melakukan proses pemekaran kelurahan mencakup beberapa aspek pendukung antara lain aspek pemerintahan, yuridis, demografis, ekologi, sosial budaya dan sosial ekonomi (pembangunan). Sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur yang saling berkaitan dan melengkapi sehingga kelurahan tersebut dapat dimekarkan.

Pemekaran kelurahan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan atau kemasyarakatan. Pemekaran wilayah dalam konteks ini adalah perluasan wilayah kelurahan sebagai akibat dari tuntutan kebutuhan

masyarakat akan pelayanan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan yang lebih optimal dan dimungkinkannya oleh perintah regulasi yang lebih tinggi. Pemekaran wilayah adalah cara dari pemerintah untuk mempersempit ruang lingkup guna untuk memudahkan pemerintah memantau kondisi perekonomian masyarakat.

Namun pada kenyataan yang terjadi di kelurahan bintauna masih terjadi beberapa permasalahan mengenai koordinasi tata kelola, kurangnya komunikasi dengan pihak kecamatan menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan yang ada, dimana kantor kelurahan bintauna tersebut belum memiliki peraturan yang belum jelas, belum adanya kejelasan implementasi mengenai penerapan kebijakan peraturan di kelurahan bintauna, serta belum adanya kejelasan peraturan pemekaran, penghapusan, penggabungan daerah otonom dan masih mengacu pada peraturan Desa sehingga dalam penganggarannya masih melekat pada kantor camat yang seharusnya kantor kelurahan memiliki Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sendiri, kurangnya komunikasi dengan pihak kecamatan tentang anggaran dan pembiayaan di kantor kelurahan mengakibatkan kelurahan hanya nama saja namun semua anggaran masih melekat di kecamatan yang seharusnya di kelola oleh kelurahan itu sendiri serta belum jelasnya mengenai pedoman peraturan yang seharusnya di kelola oleh kantor kelurahan namun di kelola kecamatan seperti contoh bila mana ada kegiatan penyusunan program masih melekat di kecamatan seharusnya bisa di kelola atau di rumuskan oleh kantor kelurahan itu sendiri sehingga kelurahan tidak mengetahui apa saja yg belum di laksanakan dan akan di laksanakan. Oleh karena itu belum adanya kejelasan mengenai peraturan pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah otonomi. Sehingga belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan good governance yang ada di kelurahan bintauna Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata Kelola Pemerintahan Wilayah Pemekaran Di Kelurahan Bintauna, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Administrasi Publik

Secara umum, tata kelola merupakan upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi, melalui prinsip-prinsip manajemen, yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Dengan demikian, tata kelola memiliki tujuan utama yaitu untuk melaksanakan manfaat, mengurangi terjadinya resiko, serta mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki (Ratih Puspita and Harto 2014)

Menurut (Juanda Nawawi 2012) Tata kelola akan terwujud apabila memiliki prinsip yang membangkitkan kepercayaan, seperti akuntabilitas, efektif, efisien, berorientasi kekeluargaan, partisipasi, penegakan hukum dan transparansi.

Menurut (Istiana Maftuchah 2015) Tata kelola akan terlaksana dengan baik jika memiliki budaya organisasi yang kondusif, serta menetapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, dan dilaksanakan saling berkesinambungan

satu sama lain, sehingga menghasilkan mitra kerjasama positif antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat selaku pengguna layanan.

Menurut (Astomo 2014) Prinsip tata kelola mengacu kepada prinsip Good Governance yang digunakan sebagai tolak ukur kinerja instansi pemerintahan.

Konsep Pemerintahan yang Baik

Pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut Government yang berasal dari bahasa latin, yakni *gubernare* yang berarti mengemudikan atau mengendalikan. Secara umum, pemerintahan diartikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu (Kadir 2016)

Pada dasarnya Konsep Pemerintahan yang baik adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.

Menurut (Zulkarnain 2012) pemerintahan yang baik merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia, dimana aplikasi dari pada konsep ini seringkali tergantung pada kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuannya yaitu pemerintah yang bersih dan demokratis.

Menurut (Sedarmayanti 2012) Governance dalam bahasa Inggris berarti tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Dalam banyak kesempatan, istilah governance dibiarkan dalam bentuk aslinya karena sulit dicari padanannya yang tepat. Banyak pula yang menerjemahkannya menjadi tata pemerintahan (Agus 2011), penyelenggaraan negara, atau diartikan dengan penyelenggaraan atau pun pengelolaan atau manajemen pemerintahan.

Konsep Administrasi Publik

Definisi administrasi seringkali hanya dipandang sebagai kegiatan tulis menulis. Secara fisik kegiatan administrasi memang banyak didominasi dalam kegiatan tulis menulis, baik menggunakan tangan, alat tulis, mesin ketik atau computer.

Chandler dan Plano dalam (Anggara 2012) menyatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

(Anggara 2012) Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apa pun dapat dilaksanakan dengan baik

Menurut (Sondang 2012) administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang

didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI bahwa administrasi merupakan kegiatan penatausahaan. Menurut (Syafi'i 2011) secara etimologis administrasi berasal dari kata "ad" dan "ministrate" terdiri dari kegiatan yang berarti melayani, membantu, memenuhi, melaksanakan, menerapkan, mengendalikan, menyelenggarakan, mengarahkan, menghasilgunakan, mengelola, menjalankan, mengemudikan, mengatur, mengurus, mengusahakan, dan mendayagunakan". Administrasi publik terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Administrasi publik sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala, ia akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, maka di asia selatan termasuk Indonesia, cina, dan mesir kuno dahulu sudah didapatkan suatu sistem penataan pemerintahan. Sistem penataan tersebut pada saat sekarang dikenal dengan sebutan administrasi publik/Negara (Thoha 2014)

Sedangkan (Zauhar 2012) Administrasi negara/ public adalah proses kerjasama yang berlaku dalam organisasi public dalam rangka memberikan pelayanan publik.

Konsep Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah merupakan pembagian kewenangan administratif dari satu wilayah menjadi dua atau beberapa wilayah. Pembagian tersebut juga menyangkut luas wilayah maupun jumlah penduduk sehingga lebih mengecil. Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan cara meningkatkan serta mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antar daerah dan pusat (Khairullah 2016).

Pemekaran wilayah kabupaten menjadi beberapa wilayah baru padadasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon kabupaten baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya alam yang seimbang antara satu dengan yang lain. Hal ini perlu diupayakan agar tidak muncul disparitas yang mencolok pada masa yang akan datang. Selanjutnya dalam suatu usaha untuk pemekaran wilayah perlu diciptakan ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru tersebut. Ruang publik baru akan mempengaruhi aktivitas orang atau masyarakat sehingga dapat merasa diuntungkan (Khairullah 2016).

Konsep Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, dan komunikasi menjadi suatu fenomena terbentuknya suatu masyarakat yang terintergrasi oleh informasi. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secaralisan, maupun tak langsung melalui media (Effendy 2013).

Menurut (Mulyana 2017), komunikasi menjadi sebuah proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan *non verbal*. Segala perilaku dapat disebut komunikasi jika melibatkan dua orang atau lebih. Komunikasi disebut efektif apabila penerima menginterpretasikan pesan yang diterimanya sebagai mana dimaksudkan oleh pengirim.

Konsep Tata Kelola

Secara umum, tata kelola merupakan upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi, melalui prinsip-prinsip manajemen, yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Dengan demikian, tata kelola memiliki tujuan utama yaitu untuk melaksanakan manfaat, mengurangi terjadinya resiko, serta mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki (Ratih Puspita and Harto 2014)

Dengan demikian, visi- misi tersebut harus berisi tentang perencanaan kedepannya. Menurut (Juanda Nawawi 2012) Tata kelola akan terwujud apabila memiliki prinsip yang membangkitkan kepercayaan, seperti akuntabilitas, efektif, efisien, berorientasi kekeluargaan, partisipasi, penegakan hukum dan transparansi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tata kelola adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis dalam menyusun, merencanakan, menganalisis, dan menetapkan perencanaan agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Tata kelola akan berjalan dengan baik apabila memiliki wadah organisasi yang mendukung, meningkatkan inovasi, serta adanya regulasi pendukung dari pemerintah.

Konsep Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.

Menurut (Solihin 2012), menyatakan bahwa "kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dibawah kecamatan. Satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Kualitataif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat deskriptif.

Menurut (Sugiyono 2017) yang dimaksud dengan metode penelitian deskriptif adalah Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono 2017) juga menjelaskan pengertian pendekatan deskriptif adalah metode

penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan yang terjadi sesuai fakta di lapangan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami suatu subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2012).

Penelitian yang akan dilaksanakan memakai 2 (dua) jenis sumber data, yaitu: Data Primer dan Data Sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

- a) Penelitian kepustakaan terdiri dari buku, teori, catatan, dokumen yang berkaitan dengan masalah diteliti.
- b) Penelitian lapangan terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya di analisis melalui tahapan sebagai berikut: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, verifikasi/ Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara kelurahan, kecamatan dan kabupaten sudah berjalan namun belum optimal dimana komunikasi tersebut membahas tentang peraturan mengenai kelurahan dimana selama ini yang menjadi permasalahan kelurahan masih dalam pengawasan kecamatan dalam pelaksanaan program sehingga dapat menghambat kemajuan dan pemerintahan kelurahan yang seharusnya berdiri sendiri dalam pengelolaan dan pelaksanaan programnya dan berdampak hingga saat ini.

Kejelasan Peraturan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa peraturan kelurahan bintana belum sesuai prosedur sebab aturan kelurahan masih melekat di kecamatan seperti desa bahkan sebagian mengadopsi dari perdes yang seharusnya kelurahan memiliki pedoman peraturan sendiri dalam pelaksanaannya, mengenai peraturan kelurahan bintana masih banyak yang harus di perjelas karena kelurahan harusnya mandiri dalam mengurus rumah tangga pemerintahan, adanya peraturan yang belum jelas menghambat proses pelaksanaan pemerintahan walaupun peraturan belum jelas pihak kelurahan berupaya terus melakukan pembenahan baik aturan dan dalam menjalankan roda pemerintahan, tetap dijalankan walapun peraturan masih melekat di kecamatan. Selain itu lurah sudah mulai berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten guna membahas kejelasan peraturan kelurahan karena selama ini masih terdapat permasalahan mengenai peraturan.

Pelaksanaan Pelayanan Kelurahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan belum berjalan optimal sebab

masih banyak yang harus di benahi terutama mengenai aturan karena sebenarnya kelurahan memiliki pemerintahan sendiri namun dalam pelaksanaannya masih melekat dibawa pengawasan kecamatan, kelurahan hanya menjalankan administrasi umum melayani masyarakat sehingga lambat pelaksanaan program yang terjadi di karenakan dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan bintana belum berjalan sebagaimana mestinya sebab itu pelaksanaan pelayanan belum dapat dijalankan sesuai aturan kelurahan yang berlaku selama ini dari segi pembangunan sarana prasarana hanya sebagai pelengkap kecamatan sehingga mengakibatkan pelaksanaan pelayanan kelurahan tidak maksimal.

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif, yaitu setiap data-data dan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian di lapangan. Pembahasan dalam penelitian ini akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan uraian deskripsi penelitian di atas, berikut disajikan pembahasan hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

Komunikasi merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan komunikasi akan timbul jika seorang manusia mengadakan interaksi dengan manusia lain, jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi timbul sebagai akibat dari adanya hubungan social.

Komunikasi sangat sering dilakukan dan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia, karena hampir setiap saat dalam kehidupan di butuhkan berkomunikasi antar individu hingga kelompok. Secara verbal terjadi pada saat seseorang dengan orang lain saling menyampaikan pesan, tetapi apabila seseorang dengan orang lain dalam jarak yang jauh dapat pula dilakukan dengan berbagai cara untuk berkomunikasi satu sama lain Pengertian tersebut mengandung arti bahwa komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Komunikasi merupakan proses interaksi untuk melakukan pertukaran informasi dengan tujuan untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain (Koesomowidjojo 2021).

Komunikasi adalah seni penyampaian informasi, gagasan, dan pandangan suatu yang penting disampaikan orang lain, agar pihak penerima memahami, mengapresiasi dan dapat menerima informasi dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian bahwa komunikasi antara kelurahan, kecamatan dan kabupaten sudah berjalan namun belum optimal dimana komunikasi tersebut membahas tentang peraturan mengenai kelurahan dimana selama ini yang menjadi permasalahan kelurahan masih dalam pengawasan kecamatan dalam pelaksanaan program sehingga dapat menghambat kemajuan dan pemerintahan kelurahan yang seharusnya berdiri sendiri dalam pengelolaan dan pelaksanaan programnya.

Peraturan adalah sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur dan kondusif. Peraturan artinya tataan atau petunjuk, kaidah, ketentuan, yang dibuat untuk mengatur. Fungsi peraturan perundang-undangan bukan hanya memberikan bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat dan

undang-undang bukan hanya sekedar produk dari fungsi negara di bidang pengaturan.

Peraturan adalah sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur dan kondusif. Peraturan artinya tataan atau petunjuk, kaidah, ketentuan, yang dibuat untuk mengatur. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. keberadaan peraturan perundang-undangan dan kegiatan pembentukan undang-undang (legislasi) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rosyid 2015)

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi, selanjutnya batasan mengenai peraturan perundang-undangan adalah semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peraturan kelurahan bintauna belum sesuai prosedur sebab aturan kelurahan masih melekat di kecamatan seperti desa bahkan sebagian mengdopsi dari perdes yang seharusnya kelurahan memiliki pedoman peraturan sendiri dalam pelaksanaannya, mengenai peraturan kelurahan bintauna masih banyak yang harus di perjelas karena kelurahan harusnya mandiri dalam mengurus rumah tangga pemerintahan, adanya peraturan yang belum jelas menghambat proses pelaksanaan pemerintahan walaupun peraturan belum jelas pihak kelurahan berupaya terus melakukan pembenahan baik aturan dan dalam menjalankan roda pemerintahan, tetap dijalankan walapun peraturan masih melekat di kecamatan. Selain itu lurah sudah mulai berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten guna membahas kejelasan peraturan kelurahan karena selama ini masih terdapat permasalahan mengenai peraturan.

Dalam menjalankan suatu aktivitas adanya pelaksanaan yang terarah mampu memberikan dampak positif untuk berjalannya suatu kegiatan. Persiapan pelaksanaan diharapkan mampu memberikan pengarahan untuk nantinya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan merupakan suatu proses tindakan mengerakan semua anggota kelompok berusaha mencapai sasaran telah direncanakan organisasi

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.

Persiapan pelaksanaan diharapkan mampu memberikan pengarahan untuk nantinya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan merupakan suatu proses tindakan mengerakan semua anggota kelompok berusaha mencapai sasaran telah direncanakan organisasi.

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung

untuk memenuhi kebutuhan. (Moenir 2015) mengemukakan pelayanan timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materiil melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan orang lain sesuai haknya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pelayanan belum berjalan optimal sebab masih banyak yang harus di benahi terutama mengenai aturan karena sebenarnya kelurahan memiliki pemerintahan sendiri namun dalam pelaksanaannya masih melekat dibawa pengawasan kecamatan, kelurahan hanya menjalankan administrasi umum melayani masyarakat sehingga lambat pelaksanaan program yang terjadi di karenakan dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan bintana belum berjalan sebagaimana mestinya sebab itu pelaksanaan pelayanan belum dapat dijalankan sesuai aturan kelurahan yang berlaku selama ini dari segi pembangunan sarana prasarana hanya sebagai pelengkap kecamatan sehingga mengakibatkan pelaksanaan pelayanan kelurahan tidak maksimal.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Adapun kesimpulan dari penelitian antara lain; a) Komunikasi antara kelurahan, kecamatan dan kabupaten sudah berjalan namun belum optimal dimana selama ini yang menjadi permasalahan kelurahan masih dalam pengawasan kecamatan dalam pelaksanaan program hingga saat ini, b) Kejelasan peraturan kelurahan bintana belum sesuai prosedur sebab kejelasan aturan belum ada dimana kelurahan masih melekat di kecamatan seperti desa bahkan sebagian mengdopsi dari perdes yang seharusnya kelurahan memiliki pedoman peraturan sendiri dalam pelaksanaannya, c) Pelaksanaan pelayanan belum berjalan optimal sebab masih banyak yang harus di benahi terutama mengenai aturan dalam pelaksanaannya masih melekat dibawa pengawasan kecamatan, kelurahan hanya menjalankan administrasi umum melayani masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan a) Perlunya pihak kelurahan interseif dalam melakukan Komunikasi perlu ditingkatkan sebab masalah peraturan perlu di komunikasikan terkait peraturan kelurahan, b) Perlunya kejelasan peraturan kelurahan bintana, c) Perlunya pemerintah dalam memberikan pelayanan harus sesuai SOP bagi masyarakat kelurahan

PENELITIAN LANJUTAN

Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk memperlengkap penelitiannya sebab dalam penelitian ini hanya memfokuskan ke tiga indicator yakni komunikasi, kejelasan peraturan, serta pelaksanaan pelayanan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan pada peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1) Tim pembimbing yang sudah banyak memberikan arahan atas penyusunan penelitian, 2) Para informan yang sudah memberikan informasi dan masukan dalam penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dwiyanto. 2011. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjadarda University Press.
- Anggara, S. 2012. *Ilmu Administrasi Negara, Kajian Konsep Teori Dan Fakta Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance*. Bandung: Pustaka Setia.
- Astomo, Putra. 2014. "Penerapan Prinsip- Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Effendy. 2013. *Ilmu Teori Dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra. Aditya Bakti.
- Istiana Maftuchah, Muliaman D. Hadad. 2015. *Sustainable Financing Industri Jasa Keuangan Dalam Pembiayaan Berkelanjutan*. Jakarta: Gramedia,.
- Juanda Nawawi. 2012. "MEMBANGUN KEPERCAYAAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 01(03). doi: 10.36719/aem/2007-2020/52/125-130.
- Kadir, Abdul. 2016. *Studi Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik*. Dharma Persada-Dharmasraya.
- Khairullah, Malik Cahyadin. 2016. "Evaluasi Pemekaran Wilayah Di Indonesia : Studi Kasus Kabupaten Lahat." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 11(03).
- Koesomowidjojo, S. R. 2021. *Dasar-Dasar Komunikasi*. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu.
- Moenir. 2015. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PT: Bumi Akasara.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja.Rosdakarya.
- Mulyana. 2017. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ratih Puspita, Silvia, and Puji Harto. 2014. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak." *Diponegoro Journal of Accounting* 3(2):1-13.
- Rosyid. 2015. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Setara Pers.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik"*. Bagian Kedua Edisi Revisi Bandung: CV Mandar Maju.
- Solihin. 2012. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia.

- Sondang, P. Siagian. 2012. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi Dan Strategi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka RekaCipta.
- Thoha, M. 2014. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Zauhar, Soesilo. 2012. *Reformasi Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zulkarnain. 2012. *Kendala Terwujudnya Good Governance*. Yogyakarta: Forum LSM DIY.